**GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN**

**Surat Kabar** : **Suara pembaruan** **Tanggal** : **6 Maret 2007**

**Subyek** : **Larangan Ekspor Pasir laut** **Hari** : **selasa**

**Halaman** : **10**

# *Menlu Yeo:*

Larangan Ekspor Pasir Laut Hak Prerogatif Indonesia

[SINGAPURA] Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo menegaskan, pihaknya menyadari bahwa pelarangan ekspor pasir laut merupakan hak prerogatif Indonesia yang terkait dengan hukum internasional. Pelarangan itu bukan untuk menekan Singapura agar menuntaskan berbagai isu bilateral yang krusial.

Yeo menandaskan bahwa tawaran Singapura untuk bekerja sama pada masalah-masalah ini masih tetap ada. "Untuk soal pasir laut, saya mengakui adalah hak prerogarif Indonesia untuk melarang ekspor, saya katakan kepada Menlu Hassan Wirajuda bahwa kami kecewa tetapi kami akan mencari alternatif untuk mengatasinya," tukas Yeo, Senin (5/3).

Yeo menjelaskan, ia telah memperoleh klarifikasi dari Menlu Hassan Wirajuda. "Pekan lalu saya bertemu Menlu Hassan Wirajuda dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Siem Rap. Dia menegaskan bahwa tidak ada kaitan antara pelarangan ekspor pasir dan hubungan bilateral lainnya. Dia menjelaskan bahwa masalah lingkungan hidup menjadi perhatian utama di Indonesia," kata Yeo.

Menlu Yeo mendapat klarifikasi bahwa pelarangan ekspor pasir bukan untuk menekan Singapura. Pada 5 Februari lalu, Indonesia mempertegas larangan ekspor pasir ke Singapura. Sejumlah kalangan di DPR mengatakan hal itu menjadi cara untuk menekan Singapura agar mempercepat pembicaraan tentang perjanjian ekstradisi dan garis batas kedua negara.

Ocean Watch dan Padma Indonesia dalam beberapa kesempatan mendesak agar Singapura dan Indonesia menuntaskan terlebih dahulu batas negara menyusul reklamasi pantai Singapura yang akan berdampak pada luas wilayah Indonesia.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Singapura juga menyayangkan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi bahwa pelarangan ekspor pasir laut karena persoalan politik.

Kontradiksi pernyataan itu sangat disayangkan. Singapura akan meminta kejelasan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Siapa yang berkomentar tidak akan membantu dan kami akan meminta klarifikasi dari Kedutaan Besar Indonesia di Singapura apakah pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi mewakili kebijakan pemerintah Indonesia," demikian pernyataan tertulis pihak Singapura.

Awal pekan lalu, pihak TNI AL menahan sejumlah kapal yang bermuatan granit ke Singapura. Pihak Singapura melakukan pertemuan Third Party Note dengan Indonesia dan meminta KBRI di Singapura untuk segera membebaskan kapal-kapal yang ditahan itu.

Yeo menambahkan, pembicaraan soal ekstradisi dan kerja sama pertahanan dengan Indonesia akan dibahas di tingkat menteri. Pembahasan itu tetap mengacu pada kesepakatan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong agar masing-masing pihak memperoleh manfaat. [AP/H-12]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup